

# IMPLEMENTASI *BEST PRACTICES* PROGRAM RUMAH TANGGA MANDIRI PANGAN DAN ENERGI (RTMPE) DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Deni Agusta Putra

Email : [prof.deniagusta@gmail.com](mailto:prof.deniagusta@gmail.com)

Pembimbing : **Drs. H. Chalid Sahuri, MS**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*Best Practices are defined as initiatives that have resulted in contributions prominent (outstanding contribution) in improving the quality better of life. The research objective to see the implementation of best practices program independent household of food and energy in kampar regency and to determine the factors that affect the implementation of best practices program independent household of food and energy in Kampar regency.*

*Theoretical concept that researchers use are eko prasojo (2004:4) thereare three partnerships and sustainable impact. This research uses qualitative methods with an assessment of descriptive data. In the data collection reseachers use interviewing techniques, observation and documentation. By using purposive sampling method in which sample is designed by researchers and triangulation techniques as a source af data authenticity.*

*The results showed that the implementers, implementation of best practices in independent households of food and energy in Kampar Regency not ranning optimally because there are still many obstacles in the implementatin, because there are many people who are not interested in implementing the program independent household of food and energy although mainstay programs Kampar Regency with the goal of three zero, zero proverty, zero unemployment and zero slum housing.*

*Factors that hinder the implementation of best practices program independent household of food and energy in Kampar Regency (1) public's understanding of the program (2) participation in the implementation of the program (3) the role of regent in the innovation program (4) a bureaucratic culture.*

**Key Words : Implementasi , Best Practices, Program.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam

dua hal; pertama bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia, berupa ancaman dis integrasi bangsa, kemiskinan, ketidakterataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dalam masalah pembangunan SDM; kedua otonomi daerah dan

desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era Globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa kompetisi mulai mengeliat di sektor publik. Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan kapasitas Inovatif dari masing-masing pemerintah daerah untuk mensiasati problema yang ada. Inovasi bagi sebuah Pemerintahan Daerah merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerahnya. Inovasi sendiri merupakan sebuah proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik yang kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk mewujudkannya dan membuatnya berjalan dengan baik.

Namun kemampuan inovasi tersebut hanya akan muncul bila adanya upaya awal untuk mentransformasikan peran pemerintah daerah dan memberi ruang lebih leluasa bagi pengelola pemerintah berbasis jaringan (*network governance*). Dalam kondisi seperti ini kepemimpinan transformasional memainkan peran yang sangat signifikan. Pemerintah berbasis jaringan (*network governance*) merupakan mekanisme interaksi, kerjasama, dan saling ketergantungan yang terbentuk dan terinstitusionalisasi secara reguler. Jaringan juga bisa dimaknai sebagai hubungan antar aktor baik individu maupun organisasi yang sifatnya formal dan semi formal dalam satu lingkup sistem kebijakan tertentu **Hanif (2006:140)**.

Perlu di tegaskan bahwa optimalisasi dan efektifitas local governance sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan jaringan. Jaringan penting untuk dikelola karena jaringan hadir bukan sekedar disebabkan oleh saling ketergantungan sumberdaya semata yang terpola dengan sendirinya.

Kebutuhan akan saling ketergantungan sumberdaya mengemuka lebih disebabkan oleh adanya kreasi melalui apa yang kemudian disebut dengan manipulasi ide atau Knowledge management.

Kebijakan atau program Knowledge management di setiap organisasi pastilah ditujukan untuk mencapai kinerja karyawan yang tinggi, mampu berinovasi meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, mampu mentransfer pengetahuan yang telah dipelajarinya dari berbagai kegiatan, meningkatkan kerjasama, mencapai best practices sebagaimana dikehendaki organisasi.

*Best Practices* menurut **Prasojo (2004:4)** dalam konteks kehidupan perkotaan didefinisikan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi menonjol (*outstanding contributions*) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di kota-kota maupun masyarakat umum lainnya. Elaborasi lebih lanjut terhadap definisi tersebut dilakukan oleh UN sebagai inisiatif yang telah terbukti sukses, yakni:

- a. Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani;serta
- c. Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan

Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Riau dengan seorang pemimpin bupati Jefri Nor, SH yang menggunakan momentum otonomi daerah yang memberikan kebebasan setiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mengimplementasikan visi misi pemerintah Kabupaten Kampar membuat program andalan, program ini merupakan antitesis dari isu pangan, isu

energi dan isu lingkungan. dalam Peraturan bupati kamar nomor 37 tahun 2015 yaitu Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE). Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) adalah rumah tangga yang berupaya memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Berdasarkan ke mampuan sumber daya berbasis sinergitas/ kemitraan antara pemerintah & pihak swasta/masyarakat, diantaranya bantuan modal dalam bentuk dari perusahaan, perbankan dan dana bergulir dari pemerintah kabupaten kamar.

Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) merupakan program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kamar, Riau. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemerintah menuju swasembada dan memperkuat ketahanan pangan serta energi. Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) yang dijalankan Pemerintah Kamar Provinsi Riau sangat potensial untuk menguatkan ketahanan pangan dan energi sehingga memang harus ditularkan ke berbagai daerah lainnya, RTMPE merupakan program terbaru.

Dari sejumlah inovasi program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kamar dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait dengan pelaksanaan inovasi program tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkisar kepada pertanyaan seputar detail informasi mengenai inovasi program yang dilakukan serta sejauh mana inovasi program tersebut adalah benar-benar dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi yang telah memenuhi sejumlah kriteria (indikator) tertentu dan menjadi best practices yang dapat menjadi pelajaran (lessons learned) dan contoh bagi Pemerintah Daerah lainnya.

Atas dasar fenomena yang terjadi dalam program rumah tangga mandiri pangan dan energi (RTMPE), peneliti tertarik membuat penelitian skripsi dengan judul : **“Implementasi Best Practices Program Rumah Tangga Mandiri**

## **Pangan dan Energi (RTMPE) di Kabupaten Kamar”**

### **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Best practices program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) di Kabupaten Kamar ?
2. Faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Best practices program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi?

### **KONSEP TEORI**

#### **1. Best Practices**

**Prasojo (2004:4)** *Best Practices* konteks kehidupan perkotaan didefinisikan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi menonjol (outstanding contributions) dalam meningkatkan kualitas kehidupan baik di kota-kota maupun masyarakat umum lainnya Elaborasi lebih lanjut terhadap definisi tersebut dilakukan oleh UN sebagai inisiatif yang telah terbukti sukses.

1. Memiliki dampak yang dapat ditunjukkan dan didemonstrasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Merupakan hasil dari kerjasama yang efektif antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani serta.
3. Berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Di sektor publik, makna **Morris** dan **Jones** dalam **Muhammad (2008:71)** reinventing goverment terus berkembang

dengan munculnya pemikiran tentang public entrepreneurship yaitu proses penciptaan nilai bagi warna negara dengan mengombinasikan sumber daya publik atau swasta dan memanfaatkannya untuk mendapatkan sosial opportunities.

**Osborne dan Gaebler dalam Muhammad (2008:2)** reinventing government menekankan, harus ada upaya untuk mentransformasikan entrepreneurial spirit jiwa kewirausahaan karena dalam masa dimana sumber daya publik semakin langka, pemerintah harus berubah dari bureaucratic model ke entrepreneurial model.

Menurut **Muhammad (2008:78)** reinventing local government untuk saat ini ditekankan pada peningkatan kapasitas manajemen yang berkesinambungan agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dalam menghadirkan pelayanan publik. Inovasi adalah kunci dalam reinventing local government, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menentukan bagaimana pemerintah daerah mendapatkan dan memilih input, memproses, dan menghasilkan output yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dan **Linsu Kim dalam Muluk (2008:54)** Kemampuan berinovasi awalnya didahului dengan adanya kemampuan melakukan imitasi, terhadap kondisi (pengetahuan, produk, teknologi, metode) terkini. Kajian inovasi selama ini menunjukkan bahwa proses inovasi juga tidak sesederhana seperti menerjemahkannya dengan membawa kebaruan saja, namun justru lebih kompleks dari hal tersebut karena melibatkan banyak aspek terutama di sektor publik. (**Mulgan dan Albury 2008 dalam Muluk**), menunjukkan bahwa *“successful innovation is the creation and implementation of new process, products, services, and methods*

*of delivery which result in significant in outcomes efficiency, effectiveness or quality”* Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil.

Perubahan pada teknologi bisa berarti perubahan proses produksi, keterampilan, basis pengetahuan sehingga produksi lebih efisien, produk lebih cepat menghasilkan. Tetapi juga bisa berarti dihasilkan produk baru untuk pasar yang benar-benar berbeda. Ini diikuti dengan perubahan dominan administrasi, sistem pengajaran, struktur, dan tentu saja nilai-nilai korporat. **McCann dalam Kasali (2010:76)**

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan (**Sugiono, 2006:11**). Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena – fenomena yang ada kaitanya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian, penelitian dilaksanakan di Bangkinang Kabupaten Kampar terkait program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar. Dipilihnya daerah ini sebagai penelitian disebabkan setelah di keluarkan perbup no 37 Tahun 2015 tentang Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi banyak dapat apresiasi dari berbagai

pihak sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar.

## 2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi peneliti sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar. Informan penelitian tentang situasi dan kondisi yang diteliti (Moleong 2004:132)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yang sampelnya di tetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dipilih metode ini karna dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realita yang tidak tunggal, untuk mendapatkan variasi informasi sebanyak-banyaknya sesuai pokok permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang akan dianalisa dalam hasil penelitian nantinya melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang pelaksanaan program rumah tangga mandiri pangan dan energi kabupaten Kampar.

#### b. Data Sekunder

Adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua untuk melengkapi data primer, seperti :

1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2015
2. Dokumen RPJMD 2011-2016 Kab. Kampar

3. Peraturan perundang – undangan dan data lain yang mendukung penelitian ini

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam suatu proses penelitian, terjadi proses pengumpulan data, proses tersebut dapat dilakukan dengan teknik tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Wawancara

Menurut Mulyana (2004:180) wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara digunakan melalui petunjuk umum wawancara yang menggunakan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Bast Practices Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar.

### b. Observasi

Menurut Nazir (2005:175) pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki, dimana observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kondisi pelaksanaan program rumah tangga mandiri pangan dan energi di Kabupaten Kampar.

### c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, buletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Suatu teknik yang digunakan dengan mengumpulkan literature untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang dimana melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru

Implementasi *Best Practices* Program Rumah Tangga Mandiri Pangan

dan Energi (RTMPE) semua mulai dari Pertanian, Perikanan dan Perternakan, terintegrasi di program ini, Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) merupakan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kampar . Tujuan dari program ini adalah untuk membantu pemerintah menuju swasembada dan memperkuat ketahanan pangan serta energi, program ini merupakan antitesis dari isu pangan, isu energi dan isu Lingkungan. Sehingga dengan adanya program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi terwujudnya tujuan 3 Zero Kabupaten Kampar dan tercapainya yang dinamakan Lima pilar pembangunan dapat terwujud.

Dengan banyak kunjungan dan apresiasi yang datang dari pemerintah daerah maupun nasional maka peneliti melihat bahwa program ini adalah salah satu program inovasi yang mana dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat menurut Linsu Kim kemampuan berinovasi awalnya didahului dengan adanya kemampuan melakukan imitasi, terhadap kondisi (pengetahuan, produk, teknologi, metode) terkini. Kajian inovasi selama ini menunjukkan bahwa proses inovasi juga tidak sesederhana seperti menerjemahkannya dengan membawa kebaruan saja, namun justru lebih kompleks dari hal tersebut karena melibatkan banyak aspek terutama di sektor publik.

Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi ini juga berbasis sinergitas/kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta/masyarakat, diantaranya melalui bantuan modal dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan. Program ini saling berkesinambungan satu program RTMPE melibatkan beberapa dinas, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan yang dikoordinir oleh Bupati Langsung.

Mulgan dan Albury 2008 dalam Muluk, menunjukkan bahwa "successful innovation is the creation and implementation of new process, products,

services, and methods of delivery which result in significant in outcomes efficiency, effectiveness or quality” Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses , produk, layanan, dan metode pelayanan baru merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil.

Maka dalam Implementasi Best Practices Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) di Kabupaten Kampar ini peneliti menggunakan teori Eko Prasajo (2004:4) dimana dalam mencapai Implementasi Best Practices terdapat 4 Indikator yaitu:

1. Dampak (*Impact*)
2. Kemitraan (*partnership*)
3. Keberlanjutan (*sustainability*)

Dalam mencapai sebuah program dengan Implementasi Best Practices memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan indikator yang telah di tentukan oleh para ahli. Untuk lebih jelas peneliti akan membahas lebih rinci berdasarkan Indikator yang peneliti gunakan yaitu:

#### **1. Dampak (*Impact*)**

Sebuah *Best Practices* harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung. Dalam tercapainya kabupaten kampar mewujudkan suksesnya program rumah tangga mandiri pangan dan energi harus perlu di ukur berdasarkan kepada sejumlah parameter, dalam mengimplementasikan *best practices* program rumah tangga mandiri pangan dan energi di Kabupaten kampar.

dampak dari program rumah tangga mandiri pangan dan energi lebih banyak di apresiasi dari luar tetapi masyarakat Kabupaten kampar kurang tertarik sehingga yang melakukan program di kabupaten kampar tidak banyak yang melaksanakan sehingga program ini kurang populis bagi masyarakat kabupaten Kampar sendiri

bahwa proses tetap berjalan program rumah tangga mandiri pangan dan energi ini kurang berjalan dengan baik karna masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan juga sedikit dari masyarakat yang tertarik untuk melaksanakan program ini walaupun dari lembaga atau pemerintah pusat banyak mendapat apresiasi karna tujuan yang sebenarnya program ini untuk rakyat Kabupaten Kampar sendiri sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat ada tetapi relatif kecil sehingga belum memberi perubahan yang mendasar.

Oleh karna itu aparat pemerintah dalam proses ini harus terus mengalakan sosialisasi dan peyuluhan secara berkesinambungan sehingga masyarakat berminat dalam melaksanakan program ini, pemerintah juga harus terjun ke masyarakat langsung tidak hanya membekali aparat perdesaan tetapi, para ahli dalam bidang yang dilaksanakan oleh rumah tangga mandiri pangan dan energi sehingga masyarakat mengerti dengan program unggulan pemerintah Kabupaten Kampar ini.

kurang sosialisasi dan fokus pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan program ini walaupun program ini sangat familiar di pemerintah daerah lain bahkan nasional karna pemerintah lebih fokus dengan promosi keluar ini juga salah satu strategi dari pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencuri perhatian kalayat banyak tetapi inti program sebenarnya Implementasi di lapangan.

bahwa program RTMPE belum terlalu maksimal walaupun pemerindah daerah lain dan juga pemerintah pusat sangat mengapresiasi walaupun banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dan melihat langsung ke pusat pelatihan percontohnya di kecamatan kubang raya tetapi tidak bisa di pungkiri

program RTMPE tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Kampar, dan untuk mempercepat tercapainya peningkatan penghasilan bagi rumah tangga miskin dalam rangka percepatan terwujudnya pencapaian zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah kumuh.

## 2. Kemitraan (*partnership*)

Kemitraan (*partnership*), sebuah *Best Practices* harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat. Setidaknya melibatkan dua pihak dalam program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) Kabupaten Kampar adalah Rumah Tangga yang berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya yang dimiliki yang berbasis sinergi/kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta/masyarakat, diantaranya melalui bantuan modal dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) dari Perusahaan.

aktor yang terlibat disini SKPD belum terlalu berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan dilapangan yang terlibat hanya berfokus kepada apa tugas masing-masing sedangkan program RTMPE ini saling berkesinambungan sehingga pencapaiannya tidak akan maksimal karna SKPD tidak menjalankan koordinasi. dengan baik,

pemimpin daerah harusnya pemerintah membantu masyarakat miskin yang terkendala dalam hal jaminan untuk meminjamkan dana kepada pihak bank, mengingat pihak pemerintah memberikan solusi yang kokrit karna inti dari program RTMPE ini untuk kesejahteraan masyarakat banyak, sedangkan masyarakat terkendala dalam hal permodalan disinilah saatnya pemerintah hadir memberikan solusi kongkrit, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat bukan tidak mau melakukan program ini tetapi terkendala dalam hal permodalan.

pemerintah tidak fokus dengan kendala dasar yaitu modal sehingga dalam pelaksanaan program ini tidak berjalan dengan baik yang menjalankan program ini hanya orang secara individu tidak kelompok, sebenarnya tujuan utama program ini untuk kesejahteraan masyarakat tetapi yang menjalankan program ini tidak banyak masyarakat, selain itu kendala dari masyarakat kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh dinas terkait mengingat masyarakat tidak tahu dalam hal perawatan. Selama ini dana untuk melaksanakan program ini dana pribadi dan juga tidak melaksanakan program secara kelompok tetapi pribadi, walaupun peraturanya secara kelompok baru bisa dibuat.

kerja sama dengan pihak swasta/masyarakat ,diantaranya melalui bantuan modal dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) dan perusahaan tidak berjalan dengan efektif terbukti dengan sedikit masyarakat yang ikut dalam melaksanakan RTMPE ditambah dengan pernyataan masyarakat yang tidak ada dibantu oleh pihak perusahaan maupun pengurusan peminjaman bank harus ada jaminan sedangkan masyarakat miskin tidak memiliki jaminan untuk peminjaman uang di bank sehingga hal ini kurang efektif dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi belum ada kerja sama dengan Riset Development sehingga program hanya langsung di lakukan masyarakat yang telah dilatih di P4S sehingga masih banyak kekurangan mengingat masyarakat yang melaksanakan program kurang memiliki ilmu dalam mengimplementasikan Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi ini sehingga belum tercapai dengan target yang diinginkan.

kendala dasar yaitu permodalan walaupun pemerintah telah menjalin kerja sama dengan pihak bank dengan suku bunga yang rendah tetapi



masyarakat tidak memiliki jaminan dalam peminjaman modal, sehingga masyarakat sedikit yang melakukan program ini mengingat modal adalah awal dalam program RTMPE ini, selain dalam hal permodalan kendala bagi masyarakat dalam pelaksanaan program ini adalah kurang termanajemen tim penyuluh dalam hal sosialisasi atau memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan program ini mengingat dalam penyuluhan pemerintah tidak memiliki jadwal yang jelas.

Dapat disimpulkan kemitraan antara pemerintah dan swasta/masyarakat, maupun bantuan modal dari bank maupun corporate social responsibility (CSR) maupun antara masyarakat yang melaksanakan program dengan pemerintahan dalam hal ini dinas terkait belum berjalan dengan baik sehingga ini adalah salah satu kendala yang mendasar dalam mengimplentasikan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi.

### **3. Keberlanjutan (*sustainability*)**

Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah Best Practices harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan dalam hal ini di program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar, Untuk mengetahui bagaimana Keberlanjutan (*sustainability*), dalam pelaksanaan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi

keberlanjutan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar ini juga sangat tergantung dengan masyarakat berlanjut tidaknya tergantung bagaimana antusias dari masyarakat dalam melaksanakan program RTMPE, sehingga program ini tetap berlanjut jangan sampai berganti pemimpin tidak berlanjut program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi.

Menurut sekretaris BPPKP seperti wawancara diatas optimis program ini berlanjut kendala sekarang

masih banyak masyarakat yang belum tertarik karna masyarakat pemalas dan juga masyarakat belum terlalu familiar dengan program andalan Kabupaten Kampar ini sehingga pemerintah akan terus mensosialisasikan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi sehingga masyarakat melaksanakan program ini dan tercapainya 3 zero Kabupaten Kampar, zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah kumuh.

informan secara pribadi program ini akan berlanjut karna alasannya dengan alat yang mahal dibeli oleh petani, kalau tidak dilanjutkan akan banyak rugi, dan juga kebutuhan atas pelaksanaan program ini masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan ini adalah salah satu kendala yang di hadapi oleh dinas pertanian.

pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan pemimpin sekarang karna setiap pemimpin memiliki cara dalam mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya, kalau nanti dilanjutkan program RTMPE ini oleh pemimpin baru yang akan menggantikan pemimpin sekarang harus membuat tempat pelatihan kepemilikan pemerintahan daerah jadi pelaksanaan selanjutnya bisa melanjutkan di tempat yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dan kurangnya sumber daya manusia juga adalah salah satu hal penting dalam meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program ini, sehingga masyarakat tertarik dalam melaksanakan program ini karna telah banyaknya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaksanaan program sehingga kendala yang dihadapi bisa ditangani bersama.

Keberlanjutan rumah tangga mandiri pangan dan energi terkendala dalam permodalan sehingga secara umum persentase masyarakat dalam melaksanakan program ini masih sedikit, dan dalam mensukseskan program ini masyarakat juga harus menyediakan

pasar dalam menjual hasil dari program rumah tangga mandiri pangan dan energi sehingga dengan adanya hasil masyarakat antusias dalam melaksanakan program.

Dan untuk keberlanjutan program ini memang peranan penting itu ditentukan oleh pemimpin selanjutnya dan yang paling penting adalah antusias dari masyarakat sehingga pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan keberlanjutan dari program ini selain tergantung dari pemimpin masyarakat juga memiliki andil besar karna masyarakat yang akan melaksanakan di tambah harus sesuai dengan peraturan yang ada, maka program ini akan berjalan dengan baik sehingga nantinya akan tercapai sebagaimana yang telang di tuangkan dalam visi-misi Kabupaten Kampar yang tujuannya pada tahun 2016 tercapai 3 Zero, zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah kumuh.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan Implementasi *Best Practices* akan mengalami banyak hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor dalam pelaksanaan dalam Implementasi *Best Practices* Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi di Kabupaten Kampar. Faktor pengambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat mengambat Implementasi *Best Practices* tersebut terdapat bersumber pada internal dan eksternal. Program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan direplikasikan di daerah lain tetapi harus masih banyak perbaikan.

Pada dasarnya beberapa program tersebut sudah diterapkan di daerah-daerah lain. Bahkan program rumah tangga mandiri pangan dan energi ini atalah salah satu program yang dinamakan oleh bupati Kampar Amati Tiru Modifikasi (ATM). Berikut ini akan dianalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh program inovasi di Kabupaten Kampar. Analisis akan didasarkan pada beberapa fokus faktor yaitu: (1) Pemahaman masyarakat terhadap program, (2) Budaya Birokrasi, dan (3) Aspek keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari Implementasi Best Practices antara lain sebagai berikut ini:

### **1. Pemahaman Masyarakat terhadap Program**

Aspek penting keberhasilan pelaksanaan program inovasi adalah pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tingkat pemahaman masyarakat akan mempengaruhi kesadaran dan keterlibatan masyarakat baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan program. Sedangkan tingkat pemahaman masyarakat akan ditentukan oleh penerimaan informasi pemerintah, baik melalui media dan mekanisme formal maupun informal.

bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan secara kuantitas sedikit tetapi pemerintah terus melakukan upaya hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya masyarakat yang melaksanakan program ini seperti yang dikatakan oleh bapak sudiarto seperti hanya 16% masyarakat yang mengetahui program ini yang survei yang dilakukan LPM universitas Andalas sehingga program rumah tangga mandiri pangan dan energi ini belum terlalu populis bagi masyarakat luas ini

adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program ini. sehingga dampak secara keseluruhan masih sangat kecil yang dirasakan oleh masyarakat terbuti hanya sedikit dari masyarakat yang melaksanakannya.

## 2. Budaya Birokrasi

Perubahan organisasi pemda yang cepat harus diikuti oleh perubahan paradigma Kepala Daerah dan aparatnya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara pola pikir wirausaha Bupati dengan pola pikir birokrat dari aparat. Masalah ini akan kontraproduktif jika tidak terdapat mekanisme komunikasi pimpinan dan aparat untuk menyatukan persepsi.

Karena itu diperlukan perubahan budaya organisasi secara keseluruhan dari budaya organisasi birokrasi menuju budaya organisasi entrepreneurship Di Kabupaten Kampar. sehingga tidak kerjasama antara kepala daerah dan juga perangkat yang terlibat seperti tim ahli dan tim penyuluh dalam pelaksanaan program rumah tangga mandiri pangan dan energi berjalan dengan baik dan keluhan yang di rasa kan masyarakat dapat teratasi sehingga tercapai apa yang telah ditargetkan

wawancara diatas diketahui pandangan antara skpd dengan menset bupati tentang program kurang berjalan dengan baik karna program ini adalah program yang di ambil oleh bupati dengan berkunjung kedaerah lain sehingga yang dinamakan Amati Tiru dan Modifikasi (ATM) sehingga tidak banyak yang bisa langsung berhadaptasi dengan program ini karna program baru di Kabupaten Kampar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

berdasarkan hasil dari pembahasan bab III dari 4 indikator yang digunakan sebagai alat ukur maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Best Practices* program rumah tangga mandiri pangan dan energi di Kabupaten Kampar belum di kategorikan sebagai program *Best Practices*, hal ini bisa dilihat masih banyak terdapat kekurangan dan kendala yang mendasar dalam mengimplentasikan program rumah tangga mandiri pangan dan energi, seeperti persentase masyarakat dalam pelaksanaan ini yang kuantitasnya sedikit karna program ini kurang populis bagi masyarakat walaupun program ini banyak mendapat apresiasi oleh pemerintah luar daerah , tetapi tujuan utama dalam program rumah tangga mandiri pangan dan energi adalah masyarakat.

1. Faktor yang mempengaruhi Implementasi *Best Practices* program rumah tangga mandiri pangan dan energi di Kabupaten Kampar dapat disimpulkan yakni:

a. Pemahaman Masyarakat terhadap Program, sehingga program ini kurang populis dimasyarakat walaupun banyak mendapatkan apresiasi dari pihak luar tetapi tujuan utama program rumah tangga mandiri pangan dan energi ini adalah bagi masyarakat , dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang melaksanakan ini kendala utama dalam peksanaan program ini.

b. Budaya Birokrasi, kurangnya kesamaan menset antara bupati dengan SKPD dalam pelaksanaan Implentasi *Best peractices*.

### B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi *Best Practis* program rumah tangga mandiri pangan dan energi di Kabupaten Kampar

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbaikan Sistem secara Menyeluruh, Pelaksanaan program inovasi harus diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Sistem permodalan yang dikeluhkan oleh masyarakat karna masyarakat miskin tidak ada jaminan dalam melaksanakan program rumah tangga mandiri pangan dan energi. Dan menata ulang masyarakat yang benar-benar ingin melaksanakan program dan dibimbing secara berkesinambungan oleh pihak pemerintah.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat karna dari hasil survei yang dilakukan oleh LPM Universitas Andalas hanya 16% masyarakat kampung yang mengetahui bukan yang melaksanakan tetapi mengetahui sedangkan pemerintah sendiri seakanlebih fokus mempromosikan ke luar, sedangkan tujuan utamanya adalah masyarakat. Kalau seandainya masyarakat sudah sejahtera dan peningkatan PAD tanpa harus promosi, pemerintah lain akan mengetahui prestasi dari pemerintah Kampung.
3. Peningkatan kapasitas keilmuan bagi perangkat SKPD sehingga orang yang terjun kemasyarakat , telah benar-benar dibekali sehingga keluhan dari masyarakat bisa teratasi oleh tim ahli atau Tim teknis yang membantu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanandita
- Endang, Soetari. 2014. Kebijakan Publik (Pengantar). Bandung: Pustaka Setia
- Fischer, Frank Dkk, 2015. Handbook of Public Policy Analysis, Baihaqie Iman, Bandung: penerbit Nusa Media.
- Ichsan, Moch. 2001. Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah. Malang : Brawijaya Press. Edisi Revisi
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Dynamic Policy Analisis, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Islami, Irfan. 2004. Pengambilan Kebijakan. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kasali, Rhenald. 2010. Change. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad, Fadel. 2008. Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah .Jakarta: penerbit Elek Media Komputindo.
- Muluk, Khairul 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: Penerbit

- Lembaga Penerbitan & Dokumen FIA – Unibraw.
- Mulyana, Deddy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Roskarya; Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: MN
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Galia Indonesia; Bogor
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: penerbit PT .Elex Media Komputindo.
- , 2012. Public Policy. Jakarta: penerbit PT .Elex Media Komputindo.
- , 2006. Kebijakan Publik untuk negara berkembang. PT. Gramedia
- Parsons, Wayne. 2014. Public Policy an Introduction to the theory and Practice of Policy Analysis ,Jakarta: Penerbit Fajar Interpretama Mandiri.
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrsi Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Prasojo, Eko Dkk. 2004. Reformasi Birokrasi Dalam Praktek :Kasus Di Kabupaten Jembrana, Depok : penerbitkan Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus Dkk. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Penerbit Gava media.
- Santoso, Amir. 2000. Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Gramedia.
- Subarsono AB.2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta : Sinar Grafika
- Sarundajang,S.H. 2003. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta. PT. Surya Sinar Harapan
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Lemlit UNPAD
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan, Jakarta: Penerbit Bumi aksara.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo

#### **Dokumen :**

Undang-Undang. No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang. No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang. No.23 Tahun 2014, Tentang pererintahan daerah visi media, Jakarta.

Undang-Undang. No.2 Tahun 2015, Perubahan Undang- Undang No. 23 Tahun 2014.

Undang – Undang. No. 9 Tahun 2015, Amandemen kedua Undang- Undang No. 23 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi Kabupaten Kampar.

#### **Jurnal :**

Hanif, Hasrul. 2006. Kepemimpinan Transformasi dalam Pengembangan Network Governance. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Riyadmamadji, Dodi. 2003. Pemberdayaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Mencapai Otonomi Daerah Yang Bermutu. Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru

#### **Website :**

Sumber:

<http://www.bnpp.go.id/index.php/berita/178-p4s-kampar-jadi-percontohan-bimtek-bnpp-se-indonesia> ( Diakses Pada Pukul 16.47 Wib 27 Januari 2016 )

sumber: (F. Muhardi)  
<http://kamparkab.go.id/berita/kampar/akademisi-program-rtmpe-kampar-harus-dituturkan.html> (Diakses pada pukul 22.00 Wib 15 Maret 2016)

sumber: (Hermanto Ansam)  
<http://www.goriau.com/berita/kampar/program-rtmpe-bukan-sekedar-ketahanan-pangan.html> (Diakses pada pukul 22.10 Wib 15 Maret 2016).